

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Salah satu fenomena sosial yang tercipta dari hasil budaya manusia adalah fenomena hubungan antar individu atau kelompok dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup. Begitu pula dalam dunia hubungan internasional juga terjadi fenomena hubungan antar negara atau bangsa yang saling tergantung dalam upaya pemenuhan kepentingan nasionalnya. Tiap-tiap negara menerapkan kebijakan politik luar negrinya terhadap negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Namun tidak semua kebijakan luar negeri suatu negara bisa diterima oleh negara lain dan terkadang bisa melahirkan perbedaan persepsi yang akhirnya dapat menimbulkan konflik.

Untuk menghindari atau menjaga agar konflik tidak membesar, maka ada berbagai cara untuk menjembatani kepentingan-kepentingan setiap aktor dalam hubungan internasional, yaitu salah satunya dengan cara melancarkan diplomasi. Seperti yang diketahui bahwa kebudayaan juga mempunyai arti yang luas karena sebagai suatu dimensi yang makro, kebudayaan bukan sekedar suatu kesenian atau adat istiadat saja tetapi merupakan segala bentuk hasil dan upaya budidaya manusia terhadap lingkungan. Hubungan kebudayaan bisa melibatkan dua atau lebih negara menjadi lebih dekat. Itulah sebabnya sekarang banyak negara berusaha untuk lebih meningkatkan hubungan kebudayaan sekarang ini telah menjadi alat diplomasi yang efektif. Banyak negara negara yang berusaha mendapatkan legitimasi melalui jalan diplomasi kebudayaan ini. Adapun

salah satu sarana yang dapat dipakai untuk mewujudkan diplomasi kebudayaan ini adalah melalui film. Materi ataupun isi dari diplomasi kebudayaan adalah segala hal secara makro maupun mikro yang dianggap sebagai pendayagunaan aspek budaya ( dalam politik luar negeri), antara lain : kesenian, pariwisata, olah raga, teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Pemerintah Pakistan memanfaatkan media film sebagai media ruang gerak untuk melancarkan diplomasinya dengan cara membuka kembali pintu perfilman India yang telah sekian lama ditutup di Pakistan.

Dalam kehidupan politik, film akan menjadi bahasa politik, media propaganda, dan alat kampanye politik. Sedang pada wilayah hubungan antar ideologi, film digunakan sebagai senjata untuk saling meruntuhkan nilai ideologi kedua belah pihak. Dan pada kisaran hubungan masyarakat dalam system global, film menjadi alat pengenalan dimana Masyarakat yang satu mengemukakan diri atau menilai masyarakat lain dengan segala caranya sehingga terbentuklah pemahaman identitas dari masyarakat pembuat film terhadap masyarakat penikmat film. Proses interaksi melalui film sebagai bahasa simbol inilah yang pada akhirnya menjadi peristiwa yang berefek tidak kecil.

Dengan adanya beragam fungsi film, baik itu untuk hiburan semata, maupun untuk kepentingan politik, budaya, dan sebagainya, serta untuk mengetahui sejauh mana efektifitas ataupun kemampuan penerapan kebijakan dalam konteks diplomasi kebudayaan mampu menormalisasikan keadaan konflik antara Pakistan dan India, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditujukan untuk skripsi dengan judul "**Kebijakan Pemerintah Pakistan Terhadap Peredaran Film India di Pakistan**".

## **B. Tujuan Penelitian**

- a. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang ada guna memperoleh jawaban sekaligus membuktikan hipotesa yang disusun oleh penulis.
  
- b. Penulisan ini juga dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori teori yang pernah penulis dapatkan selama di bangku kuliah.
  
- c. Memberikan gambaran bahwa penerapan kebijakan dalam lingkup diplomasi kebudayaan melalui film merupakan media dan identitas dari pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka pencapaian kepentingan nasional suatu negara.
  
- d. Selain itu penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui peran serta diplomasi kebudayaan sebagai media bagi pencapaian kepentingan nasional Pakistan serta untuk mengetahui bahwa langkah penerapan kebijakan yang dilakukan Pakistan dalam hal ini dapat mempererat dan memelihara hubungan yang harmonis dengan India
  
- e. Penulisan ini merupakan suatu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ( SI ) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### C. Latar Belakang Masalah

Dinamika politik internasional dalam suatu pola hubungan yang menjamin setiap aktor bangsa tidaklah selalu diwarnai hal-hal yang harmonis. Hal ini terjadi karena setiap negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional dan mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda untuk mereka perjuangkan<sup>1</sup>. Pakistan dan India adalah dua negara di Asia Selatan yang selalu di rundung konflik berkelanjutan antara keduanya Konflik yang ada Sebenarnya sangat merugikan negara-negara tersebut baik dilihat dari sisi ekonomi, politik, kebudayaan, militer, maupun dari segi sosial karena Lebih dari 47.000 orang warga sipil, militan dan aparat keamanan tewas dalam pemberontakan muslim di Kashmir India sejak akhir 1980-an.<sup>2</sup>

Ada beberapa faktor pemicu yang mewarnai munculnya konflik di antara keduanya, diantaranya adalah yang pertama oleh faktor sejarah, anak benua India lahir dari tangan Inggris dalam satu kesatuan pada tahun 1947.

Perjuangan Mahatma Gandhi dengan Swadeshi dan tindakan anti kekerasan untuk mencapai kemerdekaan telah berbekas secara mandalam di India yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu. Namun peninggalan Inggris di anak benua ini melahirkan potensi konflik yang bersuhu tinggi. seperti halnya di teluk Persia, peninggalan Inggris di Asia Selatan pun meledak menjadi perang saat kemerdekaan India lahir karena tak lama kemudian Pakistan lahir, memisahkan diri dari India .

---

<sup>1</sup> Tulus Warsito , *Diktat Politik Internasional*, Fisipol UMY ,2004. hal. 8.

<sup>2</sup> www. Antara news.com. 'PM India Umumkan "babak Baru" Proses Perdamaian di Kashmir Jumat, 30 Oktober 2009 00:21 WIB

Yang kedua disebabkan faktor agama, dibawah Ali Zinah Pakistan mengambil jalan sendiri memisahkan diri dari India karena merasa bahwa aspirasi umat Islam pada saat itu tak tersalurkan. Yang ketiga adalah faktor politik, setelah pisah dengan India dan menjadi Pakistan barat dan timur, Pakistan timur tidak tertampung aspirasi politiknya. Yang keempat adalah campur tangan asing, dimana Pakistan mencari perlindungan kepada Amerika dan India kepada Uni Soviet. Yang kelima adalah Faktor keamanan, perbedaan ideologi melahirkan perlombaan senjata, kecurigaan tentang kemampuan kedua negara membuat bom atom melahirkan ancaman yang terus membayangi keduanya. Yang keenam adalah faktor persaingan kedua negara untuk berusaha saling memantapkan pengaruhnya di kawasan Asia Selatan.

Banyak sekali faktor yang menjadi pemicu konflik namun yang paling banyak menyita perhatian adalah konflik Kashmir, masalah Khasmir yang berlarut-larut hingga kini pada awalnya bersumber dari perlakuan tidak adil terhadap masyarakatnya dan penindasan yang di lakukan pemerintahan Hindu Dogra di Kashmir. Namun, ketika partisi yang di berlakukan pemerintah Inggris atas wilayah jajahannya di Asia Selatan pasca perang dunia kedua tidak memuaskan bagi penduduk muslim Kashmir, masalah ini meluas ke bidang-bidang lainnya.

Sampai sekarang pun wilayah Kashmir belum bisa benar-benar di katakan damai dari konflik yang bermula tidak lama ketika kedua negara merdeka ini, yaitu pada tahun 1948 ini sekarang sudah berumur lebih dari 50 tahun. beberapa perundingan kerap di lakukan menteri luar negeri atau para petinggi negara Pakistan dan India yang pertama kali pada dekade tahun 2000 an, perundingan yang di lakukan dengan mempertemukan petinggi Pakistan dan India yang pada saat itu adalah presiden Pakistan Pervez Musharraf

dengan perdana menteri India Manmohan Singh.yang pada saat itu di tengahi oleh menteri luar negeri Amerika Serikat Collin Powell dalam kunjungannya ke Asia Selatan.

Lalu pada januari 2004 kedua negara melalui perwakilannya bertemu melakukan perundingan.satelah lima tahun tak mau berkunjung ke Pakistan dan lebih dari dua tahun tak sudi berbicara dengan pemimpin negara tetangga itu,pada tanggal 3 Januari, perdana menteri India atal Behari Vajpayee menapakkan lagi kakinya di Pakistan resminya,ia datang untuk menghadiri pertemuan puncak(konferensi tingkat tinggi) tahunan asosiasi kerja sama regional Asia Selatan (SAARC) di Islambad. Namun, Tujuan pokok sesungguhnya adalah memulai kembali usaha perdamaian India-Pakistan yang buntu sejak pertemuan puncak bilateral di Agra( India ),Juli 2001,di mana para pemimpin kedua negara yang berseturu itu gagal mencapai kesepakatan damai.

Konflik yang berkepanjangan tersebut juga berdampak pada dunia perfilman kedua negara, Tidak banyak yang tahu bahwa meski bertetangga, India dan Pakistan telah melancarkan perang dingin selama lebih dari 40 tahun dimana hal itu berdampak pada semua bidang termasuk dunia film Bollywood<sup>3</sup>. Film-film India yang sangat terkenal di dunia sempat dilarang beredar di Pakistan hal itu berawal dari terjadinya perang tahun 1965, yaitu perang besar yang merupakan lanjutan dari perang tahun 1947 dimana hal itu disebabkan perebutan wilayah dan berbagai sebab-sebab lainnya.<sup>4</sup>

Tetapi memasuki tahun 2006, film-film Bollywood mulai beredar di Pakistan, hal ini sangat disambut baik oleh masyarakat Pakistan, para sineas-sineas film dan budayawan kedua negara. Menteri Informasi Pakistan Sheikh Rashid Ahmed,

---

<sup>3</sup>.[www.indosiar.com](http://www.indosiar.com): Film Amitabh Bachchan Jadi Pembuka Hubungan India-Pakistan

<sup>4</sup> [www.Asia Calling.com](http://www.Asia Calling.com); Apakah Musik Dan Film Mengurangi Ketegangan Antara India Dan Pakistan ; 13 Desember 2008

mengatakan pihaknya secara prinsip telah setuju pemutaran sebuah film klasik besar India, Persetujuan Pemerintah Pakistan untuk penayangan sebuah film India itu menjadi catatan sejarah tersendiri setelah penerapan peraturan ketat yang melarang penayangan film-film India di negara ini.<sup>5</sup>

Mehreen Jabbar seorang sutradara kawakan dari India bahkan sudah mulai merilis film yang berjudul *Ramchand Pakistani*, sebuah film yang berkisah tentang cerita kemanusiaan di daerah perbatasan Pakistan dan India, dua negara yang berkonflik sejak 1947<sup>6</sup>. Nilai dari film ini adalah mempromosikan persaudaraan, saling menghormati, perdamaian, dan persahabatan. Diharapkan film ini akan memupus persoalan terbesar bagi masyarakat di India dan Pakistan. Selain itu Film yang menceritakan kisah abad ke-16 Masehi ketika masa kekuasaan Kaisar Muslim Akbar, film *Mughal E Azam* berlatar belakang kisah cinta gagal antara Putra Mahkota Saleem dan seorang penari istana yang cantik, Anarkali. Karya klasik yang versi aslinya diproduksi masih hitam-putih itu tahun lalu dikeluarkan kembali di India dalam tata warna. Film tersebut sangat disenangi baik oleh penduduk India maupun Pakistan karena mengingatkan kembali mereka pada kejayaan Kekaisaran Mughal dan warisan bersama mereka.

Satu lagi yaitu film kepahlawanan *Taj Mahal* merupakan film yang sangat digemari dan dinanti-nanti penduduk Pakistan<sup>7</sup>. Seiring dengan semakin banyak diputarnya film-film India di Pakistan, maka Pada 13 Mei 2006, stasiun televisi Pakistan siap menggelar acara yang diberi nama *Festival of Amitabh Bachchan* dimana dia adalah Aktor besar dalam dunia perfilman Bollywood<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> [www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com):Pakistan Mulai Izinkan Pemutaran Film India

<sup>6</sup> [www.inilah.com](http://www.inilah.com) ; Damai Kami Sepanjang Film, by *Aisha Keyla Mazzetti*

<sup>7</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com);senin 24 april2006, 16:41 WIB.

<sup>8</sup> [www.indosiar.com](http://www.indosiar.com): Film Amitabh Bachchan Jadi Pembuka Hubungan India-Pakistan

Masuknya film India ke Pakistan juga mendapat respon positif dari Presiden Pakistan Pervez Musharraf dengan memberi dukungannya bagi penayangan film itu<sup>9</sup>

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan, yaitu ” **Mengapa pemerintah Pakistan membuka kembali akses bagi perfilman India di Pakistan yang telah sekian lama ditutup? ”**

#### **E. Kerangka Penulisan**

Kerangka pemikiran/ Teori yang digunakan:

Untuk menganalisis pokok permasalahan diatas, penulis menggunakan teori sebagai dasar dalam menganalisa permasalahan yang sekiranya dapat menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Pakistan dalam membuka kembali akses perfilman India, yaitu dengan menggunakan ;

##### ***Teori Pembuatan Keputusan.***

Politik luar negeri suatu negara dalam mengeluarkan kebijakan harus mempertimbangkan banyak faktor yang mempengaruhi keluarnya sebuah kebijakan politik negara, baik kebijakan politik dalam negeri maupun kebijakan politik luar negeri. Dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri,

---

<sup>9</sup> Op.Cit : Apakah Musik Dan Film Mengurangi Ketegangan Antara India Dan Pakistan ; 13 Desember 2008

teori kebijakan politik luar negeri William D.Coplin dapat digunakan untuk menganalisa kebijakan Pemerintah Pakistan dalam memanfaatkan kebijakan pembukaan akses film India setelah sekian lama ditutup karena imbas konflik yang terjadi pada kedua negara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri secara sederhana dapat terwakilkan dalam penjelasan William D. Coplin berikut ini

*,” Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Maka salah besar jika menganggap para pemimpin negara sebagai aktor pembuat kebijakan luar negeri bertindak tanpa pertimbangan atau konsiderasi.*

Sebaliknya tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri, yaitu :

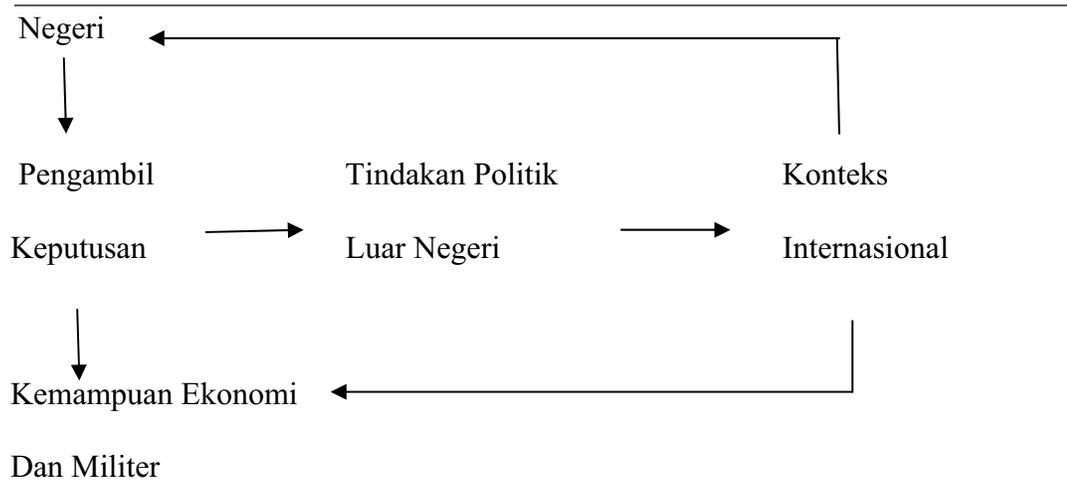
1. Kondisi politik dalam negeri
2. Situasi ekonomi dan militer negara tersebut
3. Konteks Internasional yaitu situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan masalah yang dihadapi.<sup>10</sup>

Menurut William D. Coplin, pembuat keputusan yang menyangkut kebijakan politik luar negeri dipengaruhi oleh faktor determinan utama, untuk lebih jelasnya, ilustrasi bagan dibawah ini akan menjelaskan interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

---

<sup>10</sup> William D. Coplin, *“Pengantar Politik Internasional ; Suatu Telaah Teoritis”* , Sinar Baru, Bandung, 1992, p.30

### Kondisi Politik Dalam



( Sumber William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu telaah Teoritis*, Bandung , CV. Sinar Baru,1992, Ed-2, hal.30 )

Dari ilustrasi bagan diatas menjelaskan bahwa teori ini menjalankan ketiga variabel sehingga menghasilkan tindakan politik luar negeri suatu negara yang dapat dikategorikan dalam dua faktor yaitu Faktor Internal Berupa Politik dalam Negeri dan kapabilitas ekonomi dan militer. Sedangkan faktor eksternal yaitu berupa konteks internasional.

Variabel pertama yang menghasilkan tindakan politik luar negeri yaitu *kondisi politik dalam negeri Pakistan*, dibawah Pimpinan Yousuf Raza Gilani menjadi Perdana Menteri yang baru, Gilani berusaha mewujudkan keseimbangan kekuatan nasional dan kekuatan provinsi. Karena itu muncul optimisme bahwa pemerintahan ini akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, di saat Pakistan tengah dilanda berbagai krisis

khususnya di panggung politik.<sup>11</sup> hal tersebut semakin menguatkan bahwa kondisi dalam negeri Pakistan saat ini dan yang akan datang akan berjalan baik dan stabil.

Selain itu beberapa statment yang muncul dari para petinggi-petinggi negara seperti pendapat dari Presiden Pakistan Pervez Musharraf dalam memberi dukungannya bagi penayangan film India serta para aktor-aktor penting pemerintahan yang setuju untuk mengijinkan masuknya film India ke Pakistan merupakan faktor dorongan dalam negeri yang sangat mempengaruhi terciptanya pembuatan keputusan atas Kebijakan diperbolehkannya film India masuk ke Pakistan. Dilain pihak sambutan dan tekanan dari masyarakat yang sangat antusias untuk menikmati kembali film- film bollywood yang sangat terkenal di dunia itu merupakan salah satu juga faktor pemerintah Pakistan menyetujui peneyangan film India di Pakistan. Seperti halnya salah satu masyarakat Pakistan yaitu Khawar Ayub, yang mana sangat ingin menyaksikan pemutaran film India. Selain itu, kondisi positif pun muncul dari pemerintahan pusat dan daerah yang berjalan dengan baik, hubungan antar departemen-departemen negara mampu berjalan bersama sehingga menciptakan kondisi yang bagus yang mana akan berimbas pada bidang-bidang lainnya yang ikut maju.

Variabel yang kedua adalah *kemampuan ekonomi dan militer*, Pakistan akan menjadi salah satu kekuatan baru yang akan muncul dalam percaturan militer dunia. Kemampuan menciptakan senjata nuklir menjadikan negara ini disegani oleh negara-negara dikawasan Asia Selatan bahkan negara sekaliber Amerika Serikat

---

<sup>11</sup> [www.google.com](http://www.google.com) ; Pemerintahan Baru di Pakistan

Pakistan punya 173 juta penduduk dan 100 senjata nuklir, tentara yang jumlahnya lebih besar daripada tentara Amerika, dan menjadi markas besar al Qaeda yang menguasai dua pertiga negara,” kata David Kilcullen, seorang pensiunan perwira tentara Australia, seorang mantan penasehat Departemen Kenegaraan dan konsultan anti pemberontakan pemerintahan Obama<sup>12</sup>

Ketakutan yang dilansir oleh Amerika Serikat itu membuktikan bahwa Pakistan adalah negara yang akan memiliki kekuatan hebat di dalam bidang militer. Militer Tentara Pakistan adalah kelompok yang terorganisir yang terbaik di negara ini dan sangat dihormati di masyarakat sipil dan peringkat sosial sebagai sebuah institusi. Sejak berdirinya Pakistan, tentara telah memegang kunci dalam keadaan bersama-sama, mempromosikan perasaan berbangsa dan menyediakan pelayanan tanpa pamrih benteng.

Selain itu Pakistan juga memiliki Inter-Services Intelligence yang merupakan badan intelijen terbesar dan terkuat di Pakistan, Inter-Services Intelligence juga merupakan salah satu dari 3 cabang utama biro intelijen Pakistan.<sup>13</sup> Kekuatan yang lain adalah Sekitar 700.000 personil aktif bertugas di militer yang merupakan angkatan bersenjata terbesar ke 6 di dunia. Digabungkan dengan 302.000 pasukan Paramiliter dan 528.000 cadangan, Militer Pakistan memiliki ukuran total sekitar 1.530.000 personel.<sup>14</sup>

Dengan dimilikinya Kekuatan militer yang sedemikian hebat oleh negara Pakistan hal tersebut membuktikan bahwa bidang pertahanan negara Pakistan sudah tidak perlu

---

<sup>12</sup> www.wordpress.com.;CIA: Sebentar Lagi Pakistan Akan Jadi Negara Islam Terkuat Ditulis oleh meisusilo di/pada 19 April 2009.

<sup>13</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Military\\_of\\_Pakistan](http://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_Pakistan)

<sup>14</sup> ibid

dikhawatirkan lagi, keamanan dan stock persenjataan dirasa cukup untuk menjadi benteng kekuatan dalam negeri Pakistan guna melindungi negara ini dari ancaman yang ada.

Dalam segi ekonomi Pakistan adalah salah satu anggota dari WTO (World Trade Organisation ), Ekonomi Kerjasama Organization (ECO) ,dan Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (SAARC). Ekonomi Pakistan meningkat pesat dalam beberapa dekade ini, dari ekspor saja, Pakistan meningkat lebih dari 100% dari \$ 7,5 milyar pada tahun 1999 menjadi \$ 18 miliar pada tahun 2007-2008<sup>15</sup>. Perdana Menteri Pakistan Shaukat Aziz menyatakan pertumbuhan pada tingkat 8,4% membuat Pakistan menjadi negara ke 2 yang tingkat perekonomiannya tumbuh cepat di dunia, setelah China<sup>16</sup> dari beberapa fakta tersebut semakin meyakinkan bahwa ekonomi pemerintahan Pakistan saat ini sangat stabil dan merupakan salah satu bukti bahwa Pakistan mampu menjalankan roda perekonomian di dalam negeri yang mana kemajuan ekonomi suatu negara merupakan salah satu pilar dimana negara tersebut dapat dikatakan maju atau stagnant.

Kemudian variabel pembentuk keputusan luar negeri adalah *konteks internasional*, dari Faktor eksternal, dorongan dari organisasi region seperti Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (SAARC) yang menginginkan Pakistan dan India dapat berdamai dan menemui titik terang terus menerus ditekankan.

Bahkan Persatuan Bangsa-Bangsa ( PBB ) pun juga ikut menyoroti perkembangan hubungan kedua negara. Selain itu tekanan dari organisasi perfilman Asia yang menekan pemerintah Pakistan untuk melonggarkan aturan masuknya film India ke

---

<sup>15</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Economy\\_of\\_Pakistan](http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Pakistan)

<sup>16</sup> *ibid*

negaranya juga sangat mempengaruhi pembuatan keputusan kebijakan luar negeri yang menjadi sarana pendukung demi terciptanya perdamaian di antara kedua negara serumpun tersebut ”*Badan sensor film Asia telah merubah peraturannya, untuk memberikan jalan pada masuknya film-film baru dari negara-negara tetangga mereka*<sup>17</sup>.” Begitu juga dari negara-negara Islam seperti Iran, Indonesia, Mesir bahkan ( Republik Rakyat Cina ( RRC ) juga selalu mendorong terciptanya perdamaian di antara kedua negara tersebut.

Berdasarkan dari ketiga elemen pokok pembuat keputusan menurut William D.Coplin tersebut akan menekan para pembuat keputusan negara Pakistan untuk membuat keputusan dan segera mengambil tindakan politik luar negrinya tersebut. Maka dari teori ini akan digunakan untuk menjelaskan mengapa pemerintah Pakistan mengambil kebijakan untuk membuka kembali akses perfilman India di Pakistan setelah sekian lama ditutup.

### ***Konsep Diplomasi Kebudayaan***

Pengertian diplomasi di dalam the chamber’s twentieth century dictionary, adalah seni berunding khususnya tentang perjanjian diantara negara-negara, mengenai keahlian politik<sup>18</sup> sedangkan menurut KM. Panikkar, diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> www.kapanlagi.com. Film Produksi Bollywood Mulai Diperbolehkan Masuk Pakistan

<sup>18</sup> S.L.Roy, *Diplomasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 2.

<sup>19</sup> KM. Panikkar, *The Principle and Practice Of Diplomacy Dalam Diplomasi Terjemahan Harmanto dan Misawati*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hal 3.

Definisi ini jika ditinjau dari konteks hubungan internasional tampaknya lebih mengena. Tetapi secara konvensional diplomasi diartikan sebagai salah satu usaha suatu negara/ bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dikalangan masyarakat internasional<sup>20</sup>.

Sedang kebudayaan secara makro atau dalam pengertian umum berarti segala hasil dan upaya budi daya manusia terhadap lingkungan<sup>21</sup>. Ada juga yang mengatakan kebudayaan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar<sup>22</sup>.

Dengan demikian Diplomasi Kebudayaan dapat diartikan sebagai:

Usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya, melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olah raga dan kesenian, maupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas yang utama, misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi ataupun militer<sup>23</sup>.

Secara makro diplomasi kebudayaan adalah usaha-usaha suatu negara dalam upayanya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui kebudayaan, termasuk didalamnya adalah pemanfaatan bidang-bidang teknologi, ideologi, politik, ekonomi, militer, sosial kesenian dan lain-lain dalam percaturan masyarakat internasional.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> K.J. Holsti, *International Politics A Frame Work For Analysis Third Edition*, Prentice Hall of India, New Delhi, 1978, hal 82-83.

<sup>21</sup> JWM. Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1984, hal 14-36.

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Budaya*, Aksara Baru, 1979, Hal 193.

<sup>23</sup> Op.Cit, *Diplomasi Kebudayaan*, hal 4.

<sup>24</sup> Tulus Warsito, Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan; Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang Studi Kasus Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2007, hal 5.

Mengenai sejauh mana hal-hal yang dianggap relevan dalam mengidentifikasi fenomena-fenomena Diplomasi Kebudayaan, dapat dirumuskan yaitu sebagai kajian terhadap usaha diplomasi yang menggunakan media kebudayaan dalam arti makro, seperti propaganda, hegemoni kebudayaan, dan lain-lain sebagainya.

Aktor/pelaku Diplomasi Kebudayaan dapat dilakukan oleh pemerintah, Individual, ataupun kolektif, atau setiap negara, sehingga pola hubungan Diplomasi Kebudayaan antar negara bisa terjadi antar siapa saja sebagai aktor/pelakunya, misalnya hubungan antara pemerintah-pemerintah, pemerintah-swasta, pribadi-pribadi, pemerintah-pribadi, dan seterusnya. Sebab, sasaran Diplomasi Kebudayaan ini adalah seluruh masyarakat suatu negara-bangsa, bukan sekedar pemerintahannya saja.

Dengan Diplomasi Kebudayaan memang tidak mungkin diharapkan dampak atau hasil yang langsung seperti pada diplomasi konvensional (politik). Diplomasi politik merupakan usaha yang langsung pada sasaran. ( pada pemerintah/elit negara sasaran ), dan dampaknya juga dapat diharapkan langsung dari pemerintah tersebut, sedangkan diplomasi kebudayaan adalah usaha dengan obyek sasaran massa ( tidak langsung pada pemerintah negara sasaran ). Sehingga mask akal bila dampak silang ( feed back ) dari Diplomasi Kebudayaan ini pada proses decision making elit tujuan tadi juga tidak bisa diharapkan bila langsung terjadi.

Setiap negara dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional selalu mengoptimalkan sumber daya nasional ( kekuatan nasional) dalam pemanfaatan kebudayaan. Seluruh kekuatan nasional direkayasa dalam strategi kebudayaan. Jadi Diplomasi Kebudayaan juga dianggap sebagai alat untuk memperlihatkan tingkat peradaban suatu bangsa dengan memamerkan keagungan kebudayaan tersebut.

Tujuan utama dari diplomasi kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum (masyarakat negara lain) dalam upaya mendukung suatu kebijakan politik luar negeri tertentu, untuk mencapai kepentingan nasional. Kebijakan yang dibuat Pakistan dengan membuka akses perfilman merupakan pola umum yang biasanya terjadi dalam hubungan Diplomasi Kebudayaan dimana akan mempengaruhi masyarakat India. Namun demikian, pendapat umum yang dimaksud disini adalah guna mempengaruhi policy pemerintah dari masyarakat yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Sasaran utama dari diplomasi kebudayaan adalah pendapat umum, baik ada level nasional ( dari suatu masyarakat negara-bangsa) ataupun internasional, dengan harapan pendapat umum tersebut dapat mempengaruhi para pengambil keputusan pada pemerintah atau organisasi internasional.<sup>26</sup>

Sarana Diplomasi Kebudayaan adalah segala macam alat komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, yang dianggap dapat menyampaikan isi atau misi politik luar negeri tertentu, termasuk di dalamnya: sarana diplomatik ataupun militer.<sup>27</sup> Dalam hal ini Pakistan membuka kebijakan dengan memanfaatkan sarana kesenian perfilman untuk membuka akses hubungan dengan India. Sehingga pendayagunaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan dengan memanfaatkan media film ini merupakan bagian dari diplomasi kebudayaan Pakistan, karena materi ataupun isi dari diplomasi kebudayaan adalah segala hal secara makro maupun mikro yang dianggap sebagai pendayagunaan aspek budaya ( dalam politik luar negeri), antara lain : kesenian, pariwisata, olah raga, teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid, hal .4.*

<sup>26</sup> *Ibid hal . 5*

<sup>27</sup> *Ibid, hal .5.*

<sup>28</sup> *ibid, hal .5.*

Kebijakan atas akses perfilman sebagai misi kesenian dan budaya memiliki peranan penting dalam pengembangan diplomasi kebudayaan Pakistan, dimana kebijakan ini merupakan misi untuk membuktikan bahwa Pakistan adalah negara yang memiliki citra yang baik dimana dibuktikan dengan mulai membuka diri terhadap India untuk menjalin hubungan kembali dengan India, sehingga akan menciptakan kondisi yang stabil yang akhirnya akan mewujudkan tujuan dari Pakistan yaitu menumbuhkan kerjasama antara kedua negara, karena telah dijelaskan pada latar belakang dimana diketahui bahwa hubungan antar kedua negara sangat rentan akan konflik.

Selain itu kebijakan pemerintah Pakistan ini adalah salah satu usaha diplomasi kebudayaan dimana seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pendayagunaan aspek kesenian merupakan salah satu materi daripada diplomasi kebudayaan. Dengan demikian kebijakan ini menjadi media yang cukup kompeten untuk dijadikan sebagai upaya pemerintah Pakistan untuk memperbaiki hubungan dengan India. Karena dengan diputaranya film-film India akan mengingatkan kembali masa lalu mereka dimana mereka adalah dua negara yang lahir dari kolonialisme Inggris. Persamaan budaya tentunya akan menjadikan nostalgia kedua negara ini yang akan mengingat bahwa pada masa lalu mereka adalah saudara yang hidup bersama, dimana suasana damai, sejahtera, dan hak untuk hidup bahagia dapat mereka rasakan pada saat itu. Tapi saat ini karena berbagai perbedaan yang muncul dari konflik-konflik banyak terjadi antara kedua negara baik dari konflik Kashmir yang merupakan salah satu konflik terpenting dalam hubungan kedua negara hingga konflik Bangladesh, Masa-masa indah yang mereka alami saat itu sulit untuk diwujudkan dan dinikmati saat ini.

Maka melalui kebijakan Pakistan dalam membuka kembali akses perfilman India ini menjadi misi diplomasi kebudayaan pemerintah Pakistan yang mana akan mampu mempengaruhi pemerintah India untuk memperbaiki hubungan bilateral kedua negara dan meningkatkan kerjasama.

### ***Kepentingan Nasional***

Konsep kepentingan nasional sering digunakan untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu Negara. Sebab kepentingan nasional merupakan tujuan nasional yang biasanya dijadikan dasar untuk memandu para pembuat kebijakan dalam menentukan politik luar negeri suatu negara.

Menurut Morgenthau kepentingan setiap negara adalah mengejar kekuasaan , yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain, yang diciptakan melalui tehnik-tehnik paksaan maupun kerjasama<sup>29</sup>. Dengan dimulainya kerjasama dalam dunia perfilman antara Pakistan dan India ini pemerintah Pakistan memiliki misi dibaliknya yaitu berusaha untuk lepas dari intervensi intervensi yang dilakukan oleh India, selain itu konsep kepentingan nasional memuat arti minimum yaitu kelangsungan hidup atau survival yang dalam pandangan ini, kemampuan minimum negara adalah melindungi identitas fisik, politik,dan cultural dari gangguan negara lain.

Konflik yang terus berlangsung antara Pakistan dan India telah membuat bangsa Pakistan sengsara, sehingga penerapan kebijakan yang dilakukan ini merupakan usaha

---

<sup>29</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 140-141

Pemerintah Pakistan untuk menunjukkan identitas diri bangsa Pakistan kepada India. Suatu negara bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya, mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (yaitu identitas politiknya seperti yang dilakukan oleh Amerika yang Demokratis dan Uni Soviet dengan Sosialisnya ), serta memelihara norma-norma etnis,religious, linguistic,dan sejarahnya(identitas kulturalnya)<sup>30</sup>.

Menurut Morgenthau, tujuan-tujuan umum inilah yang kemudian mempengaruhi para pemimpin suatu negara menurunkan kebijakan terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik<sup>31</sup>. Misalnya perlombaan senjata, pemberian bantuan asing, pembentukan Aliansi, perang ekonomi, propaganda, bahkan dalam kesenian film. Dibukanya akses perfilman ini dimaksudkan untuk mempengaruhi Pemerintah India agar dapat menghentikan pertikaian yang telah terjadi sehingga akan menciptakan perdamaian di kawasan Asia selatan dan Pakistan India pada khususnya.

Sedangkan menurut Jack J Plano dan Roy Orton, kepentingan nasional merupakan tujuan nasional yang dijadikan dasar dan penentu utama yang menjadi pemandu para pembuat kebijakan dalam menentukan politik luar negari suatu negara dengan negara lain. Meski setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda, namun pada ummnya kepentingan itu berkisar padalima kategori umum yaitu:

- (1) Self preservation, yaitu kelangsungan hidup bangsa dan negara,
- (2) Independence, kemerdekaan dan tidak dijajah oleh negara lain,
- (3) Military security, berarti keamanan militer,
- (4) Territorial integrity, berarti keutuhan wilayah,

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

(5) Economic well-being, atau kesejahteraan ekonomi.<sup>32</sup>

Dari beberapa konsep mengenai kepentingan nasional diatas, pada dasarnya tidak bisa lepas dari tujuan negara tersebut. Dalam pelaksanaan pembukaan akses film ini, bangsa Pakistan memiliki tujuan yaitu berusaha mewujudkan kepentingan nasionalnya yaitu untuk memperbaiki hubungan dengan India, beberapa hal yang diharapkan dari membaiknya hubungan tersebut yaitu:

*Kelangsungan hidup bangsa dan negara*, dengan lepas dari berbagai konflik dengan India maka bangsa Pakistan akan merasakan jaminan kebebasan untuk hidup bahagia, berhak melakukan segala jenis tindakan apapun sebagai negara yang telah bebas dari penindasan dan dapat berhubungan dengan negara manapun termasuk India.

*kemerdekaan dan tidak dijajah oleh India*, lepasnya Pakistan sebagai negara yang merdeka dari India meninggalkan kisah pilu pemerintah India, karena pada dasarnya konflik yang terjadi hingga saat ini dikarenakan tidak diakuinya secara penuh kemerdekaan Pakistan. Sehingga hubungan antara Pakistan dengan India tidak berjalan lancar dan sering terlibat konflik. Maka dari itu salah satu misi dibukanya akses film India ini adalah menciptakan persepsi agar pemerintah India mengakui bahwa Pakistan adalah yang secara sah telah merdeka yang mana bukan lagi bagian dari India.

Tujuan umum yang ketiga adalah *keamanan militer* , Konflik yang terjadi antara Pakistan dan India sebenarnya sangat merugikan negara-negara tersebut baik dilihat dari sisi ekonomi, politik, kebudayaan, militer, maupun dari segi sosial karena lebih dari

---

<sup>32</sup> Jack,C,Plano & Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, terjemahan Wawan Juanda Putra Abardin,1999,hal 128

47.000 orang warga sipil, militan dan aparat keamanan tewas dalam pemberontakan muslim di Kashmir India sejak akhir 1980-an.<sup>33</sup> Data tersebut sangat buruk sekali mengingat banyak korban yang tewas dikarenakan konflik yang terjadi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan perdamaian. Pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah Pakistan ini merupakan langkah untuk menghentikan perang yang terjadi sejak tahun 1947 yang dimulai dari perang Kashmir hingga perang Bangladesh. Selain itu juga merupakan tindakan mencegah terjadinya perang nuklir,. Kemampuan India dalam membuat nuklir tentu saja menjadi ancaman bagi militer Pakistan. Andai saja India meluncurkan beberapa roketnya ke wilayah Pakistan maka kerugian materil maupun immateril akan diderita cukup besar bagi bangsa Pakistan, maka sebelum hal itu terjadi, melalui jalan diplomasi kebudayaan ini, pemerintah Pakistan berharap ancaman militer dari India tersebut dapat dicegah sehingga keamanan dapat diwujudkan.

Kemudian yang keempat adalah *keutuhan wilayah*, wilayah Pakistan yang berbatasan langsung dengan India memiliki sejarah yang panjang, karena dahulu kala kedua negara ini adalah satu kesatuan utuh sebuah negara kolonial Inggris, tapi karena perbedaan persepsi yang memunculkan konflik, Pakistan memisahkan diri dan membentuk negara sendiri. Wilayah yang dimiliki Pakistan sebenarnya tidak diakui oleh India, dalam hal Kashmir misalnya, Pemerintah India menginginkan wilayah itu utuh jatuh ke tangan India, padahal secara sah melalui beberapa kesepakatan yang telah disepakati oleh pejabat kedua negara wilayah tersebut merupakan bagian dari Pakistan, maka pembuatan kebijakan ini dimaksudkan agar pemerintah India tidak mengusik lagi keutuhan wilayah Pakistan dan mengakui batas-batas kedua negara.

---

<sup>33</sup> [www.antara news.com](http://www.antara news.com). PM India mengumumkan babak baru proses perdamaian di Kashmir.

*Kesejahteraan ekonomi*, Hubungan bilateral yang sempat terputus antara Paksiatan dan India tentunya sangat merugikan kedua negara dilihat dari sisi manapun apalagi dari sisi ekonomi. Jika dilihat dari sisi ekonomi sangat jelas kerugian yang ditimbulkan. Mulai dari hancurnya Infrastrukktur akibat perang yang mana membutuhkan biaya besar untuk membangun kembali, kemudian macetnya roda perekonomian meliputi jual beli dan sebagainya yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi karena takut terjadinya serangan mendadak dari India ataupun Pakistan. Hal ini sangat sungguh disayangkan karena jika kedua negara dapat bekerjasama dalam hal ekonomi maka penulis sangat yakin bahwa kedua negara akan mendapatkan untung yang sangat besar, dan dari kerjasama ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, karena kedua negara ini memiliki baraaang-barang produksi yang berkualitas. Maka dari itu untuk mewujudkan ekonomi yang kuat dan stabil, maka pemerintah Pakistan berusaha menjalinkembali hubungan bilateral dengan India melalui dibukanya akses film India ke Pakistan.

## **F. Hipotesa**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikian diatas, maka penulis mempunyai hipotesa bahwa ***”Pemerintah Pakistan membuka kembali akses perfilman India di Pakistan karena Pemerintah Pakistan ingin memperbaiki hubungan dengan India sehingga dapat meningkatkan kerjasama antara kedua negara”***.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Pembahasan penelitian dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar permasalahan dan kajian melebur dari wacana yang telah diterapkan untuk dikaji agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan ditegaskannya batas batas kajian, maka optimisme akan menjadi pedoman dan mencegah timbulnya kerancuan pengertian dan kekaburan wilayah persoalan.

Untuk mempermudah penelitian dan menghindari kesulitan dalam mencari data maka penulis menggunakan batasan, bahwa jangkauan kebijakan pemerintah Pakistan terhadap peredaran film India di Pakistan ini membahas seputar upaya pemerintah Pakistan dalam usahanya untuk memperbaiki hubungan dengan India dan usaha peningkatan kerjasama dengan India. Konteks penelitian ini difokuskan pada batasan yaitu pada penerapan kebijakan pemerintah Pakistan dalam upaya propaganda untuk perbaikan hubungan melalui media film yang dimulai dari tahun 2006 sampai sekarang. Dengan pertimbangan bahwa tahun 2006 merupakan awal dibukanya akses masuk film India di Pakistan setelah hampir 40 tahun dilarang beredar dan perkembangannya sampai sekarang yang diketahui penulis.

Namun apabila ada pembahasan masalah masalah yang ada di luar jangkauan waktu yang ditetapkan, selama masih ada korelasi dan relevansinya akan penulis cantumkan dengan maksud sebagai tinjauan histories serta untuk menjelaskan uraian yang dimaksud.

## **H. Metode Pengumpulan Data**

Keberadaan metode merupakan salah satu syarat diakuinya sesuatu menjadi ilmu pengetahuan, disamping syarat-syarat yang lain yakni mempunyai objek, sudut pandang terhadap metode serta hasil-hasil pandangannya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat atau sistematis.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data melalui buku-buku literatur, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, surat kabar atau Koran, makalah-makalah yang disampaikan dalam seminar, artikel-artikel, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan beberapa pendukung lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk dengan akses berbagai sumber dari internet.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab dan pembahasan dalam tiap bab akan dijabarkan lebih rinci ke dalam sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab I dengan lainnya saling berhubungan sehingga pada akhirnya nanti akan membentuk karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** Merupakan pendahuluan yang meliputi penjelasan mengenai Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok

permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II Mendeskripsikan tentang gambaran umum mengenai hubungan Pakistan-India, mengenai konflik-konflik yang terjadi antara kedua negara, dan juga berisi tentang perbandingan situasi Pakistan setelah ditutupnya film India di negara tersebut, kemudian juga akan memberikan gambaran perbaikan hubungan dan peningkatan kerjasama Pakistan dan India pasca diterapkannya kebijakan pemerintah Pakistan terhadap peredaran Film India di Pakistan

BAB III Menjelaskan sekilas gambaran umum Pakistan mulai dari ekonomi, militer, politik, dan sosial serta konstitusi pemerintahan Pakistan, selain itu bab ini juga akan berisi faktor-faktor pendorong dibukannya akses film India di Pakistan.

BAB IV Berisi tentang harapan film sebagai diplomasi kebudayaan, diantaranya tentang strategi pemerintah Pakistan dalam memfungsikan film sebagai sarana pendukung tercapainya perbaikan hubungan dengan India dan bagaimana film dijadikan media pemerintah Pakistan sebagai upaya pelaksanaan pencapaian kepentingan nasional Pakistan

BAB V Berisi rangkuman atau kesimpulan dari bab-bab pembahasan dan merupakan pembahasan terakhir serta penutup dari skripsi ini